

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun kelompok baik disengaja maupun tidak disengaja. Kecurangan biasanya terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern, hal ini disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam sebuah entitas khususnya pada pemerintah daerah dilakukanlah penelitian ini. Menurut Petrovits (2010), lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan dan faktor lainnya adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada.

Pengendalian intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem pengendalian internal yang baik dapat berpengaruh terhadap pemerintah untuk mengelola kekayaan dan pendapatan daerah serta meminimalkan kelemahan pengendalian internal yang terjadi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern yaitu Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), jumlah

penduduk, temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tahun sebelumnya, tindak lanjut hasil pemeriksaan, jumlah aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota, menyatakan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota.

Jumlah penduduk merupakan suatu entitas yang juga dapat mempengaruhi dan menjadi penentu terjadinya kelemahan pengendalian intern. Adapun temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebelumnya dapat membantu pemeriksa dalam memberikan gambaran mengenai kondisi sistem pengendalian intern dan mengidentifikasi risiko pengendalian pada tahun laporan keuangan yang diperiksa. Temuan tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan tahun berikutnya selama masalah yang memunculkan modifikasi tersebut belum terpecahkan dan angka yang sesuai belum disajikan kembali atau belum diungkapkan secara benar (Fatimah, 2014). Dengan demikian semakin banyak jumlah temuan kelemahan semakin banyak risiko yang harus diperiksa dalam SPI.

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemantauan tindak lanjut sebagai salah satu proses untuk menilai kualitas pengendalian intern dari waktu ke waktu (Hyde, 2011). Semakin besar persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti, akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya temuan kelemahan SPI (Setyaningrum, 2012).

Aset suatu entitas juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari (Nurwati, 2015). Pemerintah harus mampu mengelola aset yang dimilikinya secara baik, karena pada hakekatnya aset yang dimiliki oleh pemerintah adalah milik rakyat yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyaknya aset yang ada dalam sebuah organisasi akan berpengaruh terhadap pengendalian intern, karena banyaknya aset dalam suatu organisasi berpotensi terhadap tingginya resiko kecurangan seperti pencurian aset atau penyalahgunaan aset serta permasalahan dalam manajemen aset yang bisa mengakibatkan permasalahan dalam pengendalian intern.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap sistem pengendalian intern. Menurut peneliti terdahulu petrovits (2010), menyatakan sumber pendapatan membuat masalah pengendalian intern dalam sebuah instansi pemerintahan harus semakin meningkat, agar tidak terjadinya penyimpangan yang kerap terjadi di suatu instansi.

Berikut merupakan data mengenai temuan kelemahan sistem pengendalian intern di 17 kabupaten dalam dua tahun yaitu 2016 dan 2017.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Temuan Kelemahan SPI**

No	Pemerintah Daerah	Jumlah temuan kelemahan SPI	
		2016	2017
1	Kab. Banyuasin	12	8
2	Kab. Empat Lawang	7	16
3	Kab. Lahat	6	5

4	Kab. Muara Enim	8	5
5	Kab. Musi Banyuasin	10	8
6	Kab. Musi Rawas	7	13
7	Kab. Musi Rawas Utara	10	10
8	Kab. Ogan Ilir	15	15
9	Kab. Ogan Komering Ilir	5	11
10	Kab. Ogan Komering Ulu	14	10
11	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	8	6
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	15	12
13	Kab. Penukal Abab lematang Ilir	7	10
14	Kota Lubuk Linggau	6	2
15	Kota Pagar Alam	7	7
16	Kota Palembang	10	10
17	Kota Prabumulih	7	8

Dari tabel di atas dapat dilihat masih ada jumlah temuan kelemahan SPI yang meningkat dari tahun 2016 ke 2017, seperti di Kabupaten Empat Lawang, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Prabumulih. Lalu masih ada jumlah temuan kelemahan SPI yang menurun dari tahun 2016 ke 2017, seperti di Kabupaten Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Kota Lubuk Linggau. Namun, ada juga jumlah temuan kelemahan SPI yang tetap dari tahun 2016 ke 2017, seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Kota Pagar Alam, dan Kota Palembang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terdapat jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern yang bertambah, berkurang, dan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kabupaten atau kota yang memiliki sistem pengendalian internal yang kurang baik sehingga peneliti tertarik untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari faktor penentu jumlah temuan kelemahan SPI pada pemerintah daerah di Sumatera Selatan yang nantinya peneliti berharap dengan

adanya pengaruh dari faktor penentu jumlah temuan kelemahan SPI pada pemerintah daerah akan dapat menambah jumlah temuan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pengendalian SPI.

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada Yamin dan Sutaryo (2015) yang menggunakan lima variabel yaitu jumlah SKPD, jumlah penduduk, temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya, dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian (TLHP). Namun peneliti menggunakan dua variabel independen tambahan yaitu jumlah aset dan pendapatan asli daerah dari penelitian Nurwati (2015) sehingga total variabel digunakan sebanyak 6 variabel sebagai faktor penentu jumlah temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Peneliti juga ingin menguji variabel-variabel tersebut karena hasil penelitian tentang jumlah temuan kelemahan SPI masih belum banyak dilakukan. Pemilihan objek penelitian yaitu di Sumatera Selatan. Sejauh ini belum banyak penelitian yang dilakukan pada provinsi Sumatera Selatan, penelitian banyak dilakukan di provinsi selain Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“FAKTOR PENENTU JUMLAH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA SELATAN”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern. Faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern yaitu jumlah SKPD, jumlah

penduduk, temuan SPI tahun sebelumnya, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan jumlah aset. Peneliti menguji apakah terdapat pengaruh antara keenam faktor tersebut terhadap jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah SKPD berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
3. Apakah temuan SPI tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
4. Apakah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
5. Apakah jumlah aset berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap SPI pada pemerintah daerah?

### **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Sumatera Selatan periode tahun 2016 dan 2017.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara rinci tujuan penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisa jumlah SKPD berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
2. Menganalisa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
3. Menganalisa temuan SPI tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
4. Menganalisa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
5. Menganalisa jumlah aset berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?
6. Menganalisa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah?

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dari pengetahuan dibidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, literatur dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang akan menjelaskan alasan memilih judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan dasar analisis yang berkaitan dengan temuan kelemahan SPI, faktor penentu

jumlah temuan kelemahan SPI, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian.

### **BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan dalam bab IV, Serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.